



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SPPMHKP PALANGKA RAYA

LAPORAN KINERJA SPPMHKP PALANGKA RAYA TRIWULAN I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) TAHUN 2026





SUMMARY

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5

disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamankan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SPPMHKP Palangka Raya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dengan indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, SPPMHKP Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I Tahun 2026, SPPMHKP Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya SPPMHKP Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	71
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di lingkungan SPPMHKP Palangka Raya	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SPPMHKP Palangka Raya (%)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	86
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya	71,75

		(Nilai)	
		10 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	77
		11 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	3,5

Hingga akhir Triwulan I tahun 2026, secara keseluruhan capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sasaran kegiatan yang telah terealisasi sepenuhnya meliputi 11 indikator kinerja.

Untuk indikator kinerja pengendalian mutu telah tercapai sebesar 92,21%. Indikator pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan telah tercapai sebesar 118,8 % dan Indikator Kinerja Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP, seluruhnya telah tercapai sebesar 114,09%.

Beberapa kendala dan permasalahan pasti menjadi tantangan selama Triwulan I Tahun 2026, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi SPPMHKP Palangka Raya di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan SPPMHKP Palangka Raya banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

SPPMHKP Palangka Raya yang merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah terus menjalankan tupoksinya dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat melalui laporan kinerja.

Laporan Kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj SPPMHKP Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Palangka Raya, 05 April 2026
Kepala

Miharjo, S.St.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	10
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	11
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	13
1.5. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi.....	16
2.2. Tujuan.....	17
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
2.4. Pengukuran Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja	26
3.2. Analisis dan Evaluasi	29
3.3. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Rekomendasi & Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026	2
Tabel 2.	Indikator dan Target kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 3.	Rekapitulasi capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada tahun 2024, 2025 dan Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 4.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%) oleh SPPMHKP Palangka Raya	30
Tabel 5.	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%) oleh SPPMHKP Palangka Raya	34
Tabel 6.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya	41
Tabel 7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	41
Tabel 8.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	43
Tabel 9.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat oleh SPPMHKP Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026	45
Tabel 10.	Jenis belanja DIPA di UPT SPPMHKP Palangka Raya tahun anggaran 2026 (Per 31 Desember 2025).	47
Tabel 11.	Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan I tahun 2026	47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Struktur organisasi dan Tata Kerja SPPMHKP Palangka Raya (Sesuai Permen KP No. 92/2020)	12
Gambar 2.	Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPT SPPMHKP Palangka Raya	19
Gambar 3.	Peta Strategi BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	19
Gambar 4.	Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Uji SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026	21
Gambar 5.	Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi SPPMHKP Palangka Raya di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan dan Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, SPPMHKP Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I Tahun 2026, SPPMHKP Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya SPPMHKP Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam menjaga mutu hasil pengolahan produk kelautan dan perikanan serta menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan system pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SPPMHKP Palangka Raya selama Triwulan I Tahun 2026 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerja SPPMHKP Palangka Raya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

SPPMHKP Palangka Raya merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 08 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sertifikat di tahap Produksi Primer budidaya ; CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan) ;
2. Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap ; CPIB (kapal pendinginan), CPIB based on HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan
3. Sertifikat di tahap Pasca Panen ; SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik
4. Sertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate / HC)
5. Pengendalian ketelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
6. Pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi
7. Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium
8. Harmonisasi SJMKHKP ; Kerjasama (nasional dan internasional), registrasi ke negara mitra, penanganan kasus mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan
9. Monitoring ; kesegaran, perairan (marine biotoxine, logam berat, dll), mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik.

SPPMHKP Palangka Raya sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi SPPMHKP Palangka Raya terdiri dari :

- a. Kepala SPPMHKP Palangka Raya
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi dan Tata Kerja SPPMHKP Palangka Raya (Sesuai Permen KP No. 92/2020)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi SPPMHKP Palangka Raya antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan SPPMHKP Palangka Raya disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi SPPMHKP Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun ntar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. SPPMHKP Palangka Raya sebagai UPT BPPMHKP, menetapkan visi mengacu kepada visi BPPMHKP dalam kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2026, yaitu “ Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut SPPMHKP Palangka Raya menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. SPPMHKP Palangka Raya perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas KKP adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas SPPMHKP Palangka Raya dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Persiapan alat dan bahan laboratorium untuk pemeriksaan sampel



Sampel ikan asin yang siap diujikan di Laboratorium oleh tim analis lab.



Pemeriksaan sampel di laboratorium organoleptik BPPMHKP Kalimantan Tengah oleh tim Analis

Gambar 2. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPT SPPMHKP Palangka Raya

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, SPPMHKP Palangka Raya telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis KKP secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :



Gambar 3. Peta Strategi BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Peta strategis BPPMHKP tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut *cascading*, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai SPPMHKP Palangka Raya. Dengan proses *cascading* tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai SPPMHKP Palangka Raya dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja SPPMHKP Palangka Raya secara keseluruhan di periode berjalan.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja SPPMHKP Palangka Raya di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi SPPMHKP Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium Organoleptik



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 4. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Uji SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2. Indikator dan Target kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan	72

			Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	71
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di lingkungan SPPMHKP Palangka Raya	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SPPMHKP Palangka Raya (%)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	86
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	3,5

SPPMHKP Palangka Raya telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala SPPMHKP Palangka Raya. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perjanjian kinerja BPPMHKP tersebut sesuai dengan **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2026** tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.





Gambar 5. Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi SPPMHKP Palangka Raya di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya .

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

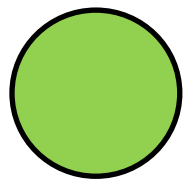
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

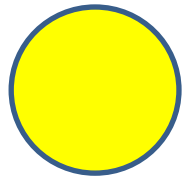
c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

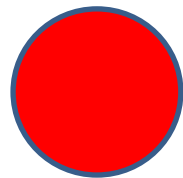
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)



$X \leq 100$
(tidak memenuhi ekspektasi)

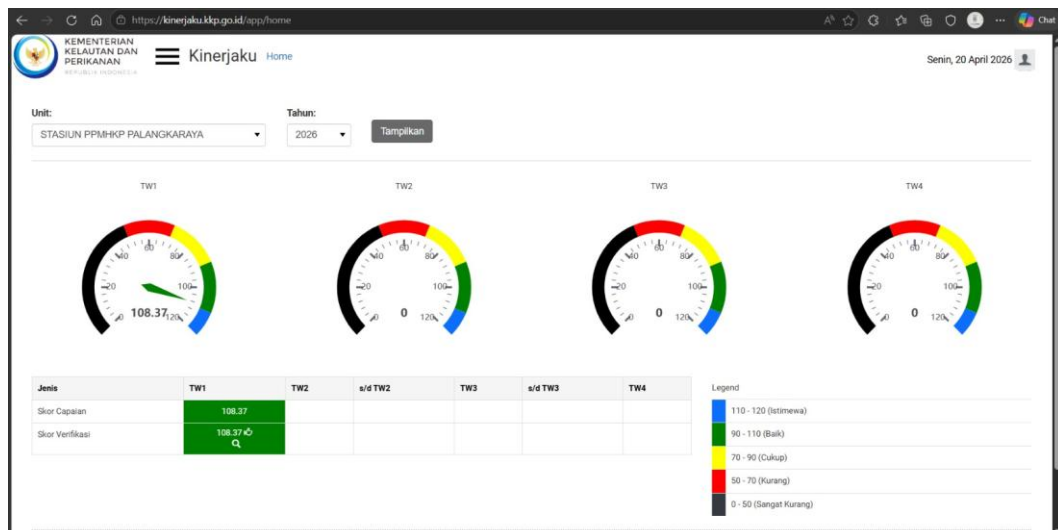
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,37 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 5. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada Tahun 2024, 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada tahun 2024, 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI (%)		
					2024	2025	Tr. I 2026
Kegiatan 1. Karantina Ikan							
SK1.1	Terselenggara pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72	120	120	90,28
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan	72	120	100	94,13

			Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)				
SK. 2.	Terselenggara nya pengendali an sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	71	-	-	118,8
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di lingkungan SPPMHKP Palangka Raya	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Indeks)	82,5	86,61	100,83	-
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	77	-	100	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	86,2	-	100,98	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SPPMHKP Palangka Raya (%)	86	100	120	116,28
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka	86	94,53	104,85	-

			Raya (Nilai)				
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	71,75	94,87	120	-
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	77	78,26	105,43	120
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	3,5	89,56	111,9	106

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada kegiatan penjaminan mutu produk perikanan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan .

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah meningkatnya persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya dari tahun ke tahun. Adapun capainnya kinerja tersebut baru terlaksana sejak adanya pemisahan lembaga dari Karantina Ikan diambil alih oleh Badan Karantina Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 01

SK. 01. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKK 01. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)

Kontribusi SPPMHKP Palangka Raya dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%) oleh SPPMHKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK. 01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72%	65%	90,28%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini

mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

BPPMHKP Palangka Raya saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;

- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Opening Asesment Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di Stasiun PPMHKP Palangkaraya



2. Asesment Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:20'17 di Stasiun PPMHKP Palangkaraya.



3. Closing Asesment Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di Stasiun PPMHKP Palangka Raya



4. Remote Verification Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17025:2017.



5. Verifikasi Quality Management System (QMS) dan Official Control (OC) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di SPPMHKP Palangka Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 02

SK. 01. Terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKK 02. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)

Kontribusi SPPMHKP Palangka Raya dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%) oleh SPPMHKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK. 01.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	02	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	72%	67,77%	94,13%

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Pasca panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Mutu Ikan Bulan Ramadhan di Pasar Modern dan Pasar Tradisional (A2 Fresh, Hypermart, Fresh Mart dan Pasar Datar Manuah Palangkaraya)



2. Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau terkait Teknis Persyaratan Administratif dan Prosedur Penertiban SKP



3. Koordinasi bersama BPOM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terkait Inspeksi Mutu Pangan di Beberapa Titik Pusat Perbelanjaan di Kota Palangka Raya



4. Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama Dengan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Terkait Sertifikasi CBIB, CPIB, CPIB Kapal, SPDI dan SKP



5. Coffee Morning Percepatan Ekspor UMKM dan Percepatan Sertifikasi Mutu Produk Hasil Perikanan



6. Rapat awa Itahun 2026 terkait perencanaan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya sektor pasca panen



7. Rapat bulanan Triwulan I tahun 2026 terkait perencanaan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya sektor pasca panen



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 03

SK. 02. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IKK 03. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar penguatan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun diluar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi :

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya

6. Persyaratan Proses

7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi :

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumber Daya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya.

Tabel 6. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK 02.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	03	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya	71%	84,3%	118%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 07

SK. 03. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palangka Raya

IKK 07. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

Kontribusi SPPMHKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

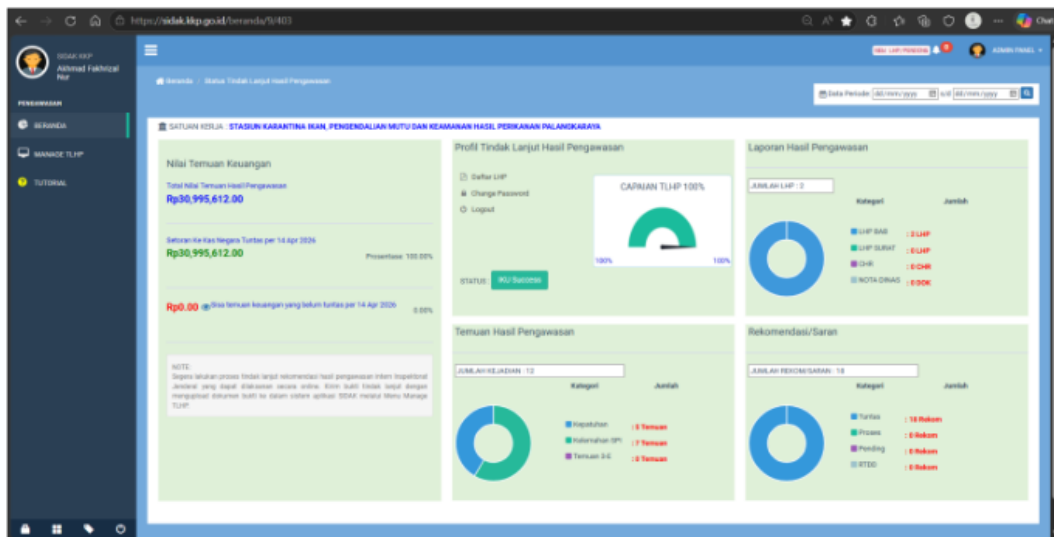
Tabel 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK 03.	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palangka Raya	07	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	86%	100%	116,28%

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pengawas internal dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP dengan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam memantau pengawasan yang lebih efisien untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100 % dengan target 86 % dan capaiannya adalah 116,28 %.

Adapun capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya Adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 10

SK. 03. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palangka Raya

IKK 10. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

Kontribusi SPPMHKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan SPPMHKP Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan	10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP	77%	100%	120%

	SPPMHKP Palangka Raya		Palangkaraya (%)			
--	-----------------------	--	------------------	--	--	--

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUB pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belana pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 100% dengan target 77% dengan capaian 129%. Frekuensi perhitungan indikator ini dilakukan setiap triwulan di tahun berjalan.

FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

$858.250.000 \times 100\% : 858.250.000 = 100\%$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 11

SK. 03. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Palangka Raya

IKK 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), dengan aplikasi ini masyarakat / pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan melalui alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna jasa.

Adapun daftar pertanyaan dalam kuisioner tersebut terkait layanan yang diberikan oleh SPPMHKP seperti ; penilaian terhadap persyaratan sertifikasi, prosedur, waktu layanan, biaya/tarif, jenis produk yang diberikan, kompetensi pemberi layanan, perilaku, sarana dan prasarana. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diakumulasi dan diperoleh nilai total.

Nilai survei kepuasan masyarakat atas layanan publik (indeks) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,7 dengan target indeks 3,5 dengan capaian 105%. Pengukuran ini dilakukan setiap triwulan di tahun berjalan.

Tabel 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat oleh SPPMHKP Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI Tri. I	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan SPPMHKP Palangka	11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	3,5%	3.7	105%

	Raya					
--	------	--	--	--	--	--

FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

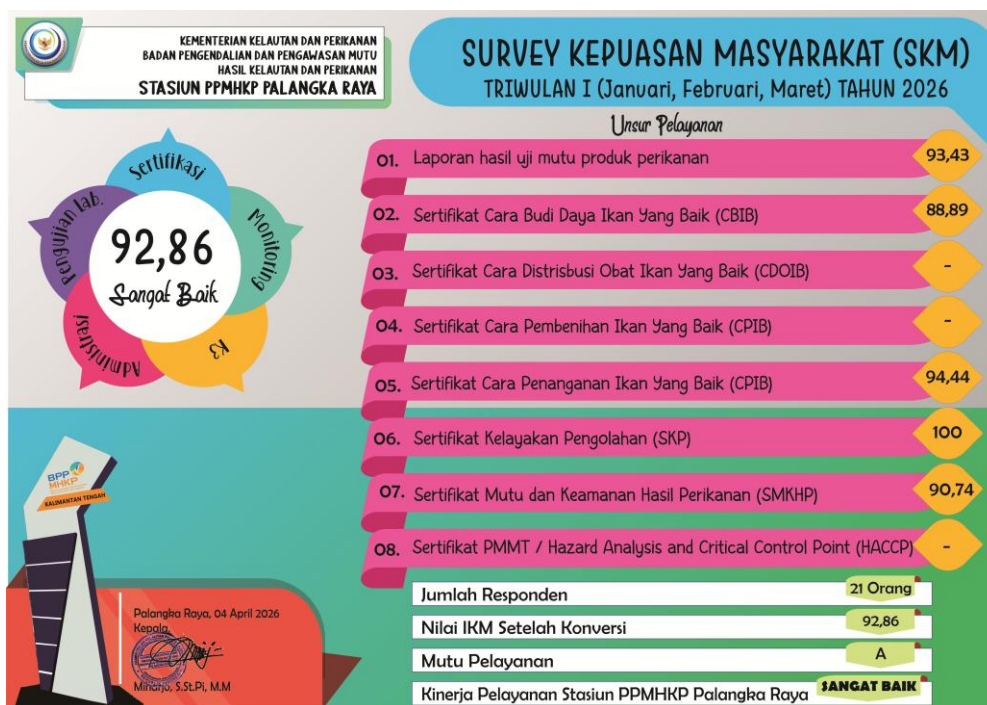
$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25



3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran di tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip **penghematan** dan **efisiensi**, bahkan beberapa kegiatan tidak tersedia anggaran atau jauh dibawah standar biaya umum (SBU), namun dengan komitmen dan pengabdian seluruh pegawai, kegiatan-kegiatan tetap terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

SPPMHKP Palangka Raya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 10. Jenis belanja DIPA di UPT SPPMHKP Palangka Raya tahun anggaran 2026 (Per 31 Desember 2025).

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KET (%)
Belanja Pegawai	2.467.294.000,-	615.290.359,-	29,94
Belanja Barang	1.013.454.000,-	289.391.424,-	28,55
Belanja Modal	-		
TOTAL	3.480.748.000,-	904.681.783,-	26%

Dari kegiatan belanja Tahun 2026 di atas, pembiayaan berasal dari :

a. Anggaran Rupiah Murni	: Rp.	3.285.873.000,-
b. Anggaran PNBPN	: Rp.	194.875.000,-
JUMLAH	: Rp.	3.480.748.000,-

Selama tahun 2026, total anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar **Rp. 3.480.748.000,-** (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan selama Triwulan I tahun 2026 telah terealisasi sebesar **Rp 904.681.783,-** (Sembilan ratus empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 26%.

Tabel 11. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan I tahun 2026

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	3.281.194.000,-	3.281.194.000,-	0,-	100
2	Manajemen Mutu	153.604.000,-	153.604.000,-	0,-	100
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	80.750.000,-	80750000,-	0,-	100
	TOTAL	3.515.548.000,-	3.515.548.000,-	0,-	100

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja di Triwulan I Tahun 2026, seluruh kegiatan yang telah ditargetkan oleh SPPMHKP Palangka Raya telah berhasil dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai SPPMHKP Palangka Raya dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I tahun anggaran 2026 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan SPPMHKP Palangka Raya. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BPPMHKP dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Laporan kinerja SPPMHKP Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di lingkungan SPPMHKP Palangka Raya pada masa datang.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja SPPMHKP Palangka Raya permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Tahun 2026, dengan demikian diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Tahun 2026.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM SPPMHKP Palangka Raya yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026, antara lain:

1. Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA;
2. Belum tercapainya Target IKU “UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SPPMHKP Palangka Raya”.

4.1. Rekomendasi & Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 11. Rekomendasi dan Hasil tindak lanjut rekomendasi terhadap IKK oleh SPPMHKP Palangka Raya selama Triwulan I tahun 2026.

No. IKK	Uraian IKK		
01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya		
	Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi	Penanggung jawab
	✓ Melakukan koordinasi dengan Pusat Manajemen Mutu	-	Penerapan Manajemen Mutu
02	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)		
	✓ Telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2026 untuk pelaksanaan pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu sektor pasca panen ke pelaku usaha perikanan	-	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Prsca Panin
03	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)		
	✓ Melakukan koordinasi dengan Pusat Manajemen Mutu	-	Penerapan Manajemen Mutu
07	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)		
	✓ Melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit pada	-	Dukungan Manajerial

	SIDAK dengan tindak lanjut sesuai batas waktu		
10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)		
	✓ Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyampaian rencana PBJ pada aplikasi SIRUP apabila adanya revisi DIPA	-	Dukungan Manajerial
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)		
	✓ Melakukan monitoring dan evaluasi pada penilaian SKM tiap unsur pelayanan di aplikasi web SUSAN	-	Dukungan Manajerial